

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Untuk tahap perencanaan di Desa Buhu telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Namun masih terdapat kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa yang terletak pada Rencana Anggaran Biaya yang seharusnya dibuat oleh aparat desa, namun disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kemampuan aparat desa maka pemerintah desa menyewa seorang teknisi dalam melakukan perhitungan untuk pembangunan.

2. Tahap Pelaporan

Untuk tahap pelaporan yang ada di Desa Buhu dapat dikatakan belum sesuai dengan peraturan yang ditetapkan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri, karena pembuatan laporan pertanggungjawaban untuk semester pertama yang belum sesuai prosedur sehingga menyebabkan sering terjadinya keterlambatan untuk pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes untuk semester pertama.

Tetapi untuk pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes untuk akhir tahun telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan yaitu Peraturan Menteri

Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Karena kantor Desa Buhu melaporkannya sebelum batas waktu yang telah ditetapkan yaitu paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. Dan untuk kendala pada pelaporan terletak pada sistem yang membutuhkan ketelitian yang tinggi, dan juga masih kurangnya pengetahuan bendahara desa mengenai sistem tersebut.

5.2 Keterbatasan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini hanya memfokuskan dan membahas mengenai 2 (dua) tahapan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu tahap perencanaan dan tahap pelaporan.
2. Penelitian ini hanya fokus pada satu desa saja yaitu Desa Buhu Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan di atas, maka saran dari penelitian ini adalah:

1. Pemerintah harus melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang pentingnya peran dan tugas dari masyarakat dalam membangun desa, termasuk didalamnya adalah dalam proses penyusunan perencanaan keuangan desa, agar setiap perangkat desa dapat bekerja sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab serta tugasnya masing-masing. Hal ini berguna untuk mencegahnya

kesalah pahaman dan pertentangan antara masyarakat dengan pemerintah desa yang ada.

2. Saran untuk Bendahara Desa Buhu agar membuat laporan semester pertama tepat waktu yaitu paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan karena jika tidak berdampak pada proses penetapan APBDes tahun berikutnya yang mengalami keterlambatan juga, akibatnya realisasi pembangunan menjadi terlambat. Dan juga masalah keterlambatan ini tidak hanya menjadi beban buat pemerintah desa sendiri tapi juga masyarakat.
3. Saran untuk peneliti selanjutnya yang akan menjadikan penelitian ini sebagai penelitian terdahulu, disarankan untuk membahas masing-masing komponen Pengelolaan Keuangan Desa dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawabannya secara rinci dan mendalam. Serta dapat menambah jumlah desa sebagai lokasi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Y. N. (2019). Tinjauan Teori Perencanaan Dalam Pelaksanaan Program Pemanfaatan Dana Desa. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 3(1), 10.
- Akhmad, A. (2020). Perencanaan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Era Globalisasi. *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 2(2), 94–104.
- Angelia, N., & Toni, N. (2020). The Analysis of Factors Affecting Dividend Policy in Food and Beverage Sector Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock Exchange in 2015-2017. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 902–910.
- Apriliana, R. (2017). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Skripsi.*,(Surakarta: IAIN Surakarta, 2017), Hlm, 22.
- Atiningsih, S. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 14–25.
- Cucuk, E. (2020). Jurnal Nasional dengan judul:" Tinjauan Hukum dan Implementasi Hubungan Pemerintahan Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa: Studi Kasus di Desa Kedung Waringin Timur Kabupaten Bogor". *Tinjauan Hukum Dan Implementasi Hubungan Pemerintahan Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa: Studi Kasus Di Desa Kedung Waringin Timur Kabupaten Bogor*, 41(68), 8045–8056.
- Daling, M. (2013). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Defriyanto, I., Yusuf, M., & Lestiyani, T. E. K. (2019). *Proses Pemekaran Wilayah Kecamatan Ber Dasarakan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2008 (Studi di Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin)*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin.

- Desa, K., Tertinggal, P. D., & Transmigrasi, R. I. (2014). Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jakarta: Biro Hukum Organisasi Dan Tata Laksana.*
- Ferina, I. S., Burhanuddin, B., & Lubis, H. (2016). Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya, 14(3)*, 321–336.
- Indrianasari, N. T. (2018). Implementasi Perpajakan Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi Pada Desa Kutorenom Kecamatan Sukodono). *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak, 2(2)*, 21–28.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (1999). *Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen.* Bpfe.
- Irwan, N., Aminuyati, A., & Khosmas, F. Y. (n.d.). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Kuala Karang. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa, 9(4)*.
- Janatun Naim, A., & Bawono, A. D. B. (2019). *Analisis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Kedungwinong, Nguter, Sukoharjo).* Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kadjudju, D., Morasa, J., & Lambey, R. (2017). Analisis Penerapan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBDes (Studi Kasus Desa Motandoi Dan Motandoi Selatan Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 12(01)*.
- Lami, D. M. P. S. (2018). *Gambaran pelaksanaan observasi pasien dengan early warning score (ews) kategori rendah dan medium di ruangan rawat inap bethesda 2 rumah sakit umum siloam kupang= an overview of the implementation of the patient's observational early warning score (ews) c.* Universitas Pelita Harapan.
- Liando, L. Y., Lambey, L., & Wokas, H. R. N. (2017). Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di

- Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Mamesah, F. Y. (2014). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (suatu Studi di Desa Sendangan Kecamatan Tompaso) 1. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 2(6), 1054.
- Meutia, I., & Liliana, L. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 336–352.
- Papalia, E. (2019). *Judul Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Didesa Waimangit Dalam Perspektif Islam*. IAIN Ambon.
- Putra, I. P. A. S., Sinarwati, N. K., & Wahyuni, M. A. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Rahmad, I. (2020). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Gampong Illie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh Tahun 2017-2019*.
- Rahmawati, H. I., & Ayudiati, C. (2015). Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman). *Prosiding Seminar Nasional & Internasional*.
- Siregar, M. (2015). Paya Meningkatkan Hasil Belajar Hasil Belajar Siswa melalui Model Pembelajaran Komperatif Tife Stad pada Kompensi Dasar Mendeskripsikan Hakikat Demokrasi Kelas VIII SMP Negeri 3 Montong Tahun Pelajaran 2014/2015. *Civitas (jurnal pembelajaran dan ilmu civic)*, 1(1), 25–38.
- Tandayu, E. O., Kaunang, M., & Sambiran, S. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Hukum Tua Di Desa Tonsewer Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten

Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471–481.

Walukow, M. I., Kalangi, L., & Pinatik, S. (2017). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa Kauneran I Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).

Wirawan, A. (2016). Kajian Yuridis Penatausahaan Barang Milik Desa yang Diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. *Info Artha*, 3, 138–153.

Yani, L. (2020). *Analisis Realisasi Anggaran Pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Aceh Tahun 2016-2018*.